



Siaran Pers

Untuk Disiarkan Segera

01 dan 03 Tak Hadiri Diskusi tentang Pengendalian Tembakau, 02 akan Kawal Bersama Konflik Kepentingan di Isu Kesehatan

Jakarta, 2 Februari 2024 – Hari ini, dua hari menjelang Debat Capres Pilpres 2024 yang kelima atau yang terakhir, Komnas Pengendalian Tembakau mengadakan diskusi publik bertajuk “Mencari Capres-Cawapres Pahlawan Kesehatan dan Pengendalian Tembakau”, di Jakarta. Hanya dihadiri oleh tim sukses Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 2, diskusi ini bertujuan untuk mempertajam isu pengendalian tembakau sebagai bagian dari isu kesehatan yang akan menjadi salah satu tema yang diangkat dalam Debat Capres Pilpres 2024 kelima, 4 Februari nanti. Dihadiri juga para aspirator yang diwakili oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dan Pusat Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), hasil diskusi melahirkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan kesehatan dan pengendalian tembakau yang akan disampaikan kepada ketiga paslon.

Pada akhir 2023, Komnas Pengendalian Tembakau meluncurkan sebuah hasil survei nasional “Perhatian Capres-Cawapres pada Masalah Kesehatan dan Pengendalian Tembakau” yang melibatkan 880 responden penduduk Indonesia yang telah memiliki hak pilih di 28 provinsi. Dari survei tersebut didapat temuan bahwa 36,6% atau mayoritas publik Indonesia tidak menjawab atau tidak tahu calon presiden yang mempunyai perhatian besar pada masalah kesehatan, dan (42,7%) tidak mengetahui perhatian bakal calon presiden Indonesia pada masalah konsumsi rokok. Hal ini kemungkinan disebabkan karena bakal calon presiden saat itu belum banyak mengangkat isu kesehatan maupun pengendalian konsumsi rokok di ruang publik.

Padahal, mayoritas publik rata-rata (di atas 90%) ingin memilih capres yang punya perhatian pada masalah kesehatan, seperti masalah BPJS, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, serta ketersediaan obat-obatan terjangkau. Mayoritas publik (76,8%) juga menganggap konsumsi rokok sebagai permasalahan kesehatan yang mengkhawatirkan dan (74,6%) menginginkan ada kebijakan tegas mengenai masalah ini. Survei ini menunjukkan, publik Indonesia menilai konsumsi rokok adalah masalah mengkhawatirkan, namun hanya 38.9% saja publik yang menilai calon presiden saat ini sudah mempunyai perhatian pada masalah mengurangi konsumsi rokok. Publik Indonesia sebagian besar (63,5%) menyatakan ingin memilih atau sangat ingin memilih calon presiden yang mempunyai kebijakan untuk mengurangi konsumsi rokok. Ini menjadi kesempatan bagi calon presiden untuk lebih banyak mendiskusikan isu rokok dalam debat publik.

Sementara itu, konsumsi rokok masih menjadi masalah yang pelik dalam kesehatan masyarakat di Indonesia. Adanya Transformasi Kesehatan yang dicanangkan Pemerintah saat ini pun dianggap belum bisa menjawab tantangan pengendalian konsumsi rokok di Indonesia karena tampak tidak berfokus pada upaya preventif-promotif. Begitu pula dengan UU Kesehatan yang baru disahkan yang bahkan telah menghapus “*mandatory spending*” anggaran kesehatan. Di sisi lain, konsumsi rokok terus menggerus kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang telah terjebak pada adiksi, yang kemudian lebih mengutamakan membelanjakan uangnya untuk membeli produk zat adiktif daripada makanan bernutrisi dan pendidikan. Begitu juga dengan masalah stunting dan konsumsi rokok yang berkelindan serta tentu saja masalah penyakit tidak menular yang terus meningkat di usia muda 10 - 14 tahun (Riskesmas 2018) dengan korban di usia produktif dan terancamnya perkembangan otak anak/remaja Indonesia akibat konsumsi nikotin (IDAI).

Dalam diskusi ini, Nina Samidi, Manajer Program Komnas Pengendalian Tembakau dalam pemantiknya menjelaskan bagaimana isu rokok sebagai bagian dari isu kesehatan ini erat dengan isu politik dan ekonomi. Begitu banyak tantangan yang muncul ketika mencari capres cawapres pahlawan kesehatan dan pengendalian tembakau, yang pada akhirnya juga menuntut komitmen para capres-cawapres bebas dari konflik kepentingan, terlebih saat ada isu pendanaan dari industri rokok yang berpotensi memunculkan intervensi kebijakan di masa depan.

Diskusi yang rencananya dihadiri oleh tim sukses dari ketiga paslon ini akhirnya hanya dihadiri tim sukses Paslon 02 yang diwakili oleh Dr. Sarah Handayani, SKM, M. Kes dari Tim Kesehatan dan R. Agung Suryanto, SE dari Tim Pertanian. Menanggapi konflik kepentingan terkait isu penerimaan dana kampanye dari industri rokok, Dr. Sarah mengakui bahwa tidak ada yang 100% terbebas dari konflik kepentingan, namun Prabowo adalah capres yang merdeka secara finansial dan menyatakan akan bersama-sama mengawal konflik kepentingan terkait pendanaan. Sementara itu, terkait perokok anak/remaja yang semakin tinggi, Dr. Sarah menegaskan pentingnya perubahan perilaku melalui promosi kesehatan, mulai dari penguatan tenaga kesehatan sampai promosi kesehatan di sekolah. Terkait konsumsi rokok dan kemiskinan, Agung Suryanto menyangkal bahwa kemiskinan tidak bisa disebabkan oleh konsumsi melainkan oleh sistem yang mendorong kemiskinan.

Secara khusus, diskusi menajam pada isu bagaimana tampaknya belum juga ada pasangan calon (paslon) capres-cawapres yang secara menonjol mengangkat isu kesehatan dalam berbagai kesempatan kampanye, termasuk isu pengendalian konsumsi rokok, bahkan ketika sudah mendekati akhir masa kampanye Pemilu 2024 saat ini. Harapan terakhir untuk bisa melihat bagaimana perhatian ketiga paslon pada masalah kesehatan adalah saat debat pilpres 2024 terakhir yang mengangkat tema “Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi” 4 Februari mendatang

Dalam diskusi ini, Sekjend PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Ulul Albab, Sp. OG mempertanyakan strategi para Paslon untuk mengatasi masalah konsumsi rokok di Indonesia. “Mengingat perokok muda saat ini sebenarnya adalah mereka yang akan menjadi tulang punggung kita ke depan. Tahun 2025 adalah momentum menciptakan negara yang sehat bagi semua, namun apakah mungkin generasi emas 2045 tercapai jika perokok muda

terus meningkat, perokok di dalam keluarga merokok meningkat, sehingga angka stunting juga meningkat,” jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dr. Agustin Kusumayati menyebutkan, “Bicara ketahanan negara, maka SDM juga seharusnya menjadi fokus. Bukan hanya jika saat sakit dapat berobat. Maka jika bicara teori, promotif- preventif menjadi bahasan, namun dalam implementasinya, sampai saat ini masih dikesampingkan.”

Dalam kesempatan ini, peserta diskusi yang hadir untuk turut menyampaikan aspirasinya sangat menyayangkan absennya timses dari dua paslon yang lain, mengingat isu kesehatan masih sangat jarang diangkat semua paslon. Juga melihat pentingnya isu pengendalian konsumsi rokok yang memiliki dampaknya multisektor ini, tampaknya tidak dianggap sebagai persoalan yang benar-benar harus diatasi dan menjadi salah satu misi ketiga paslon.

Dampak multisektor dari konsumsi rokok menjadi tantangan bagi calon pemimpin Indonesia yang akan datang sehingga ketiganya diharapkan memiliki strategi untuk mengatasi masalah ini. Namun, absennya kehadiran para timses menimbulkan keraguan atas komitmen dan keseriusan para paslon pada permasalahan konsumsi rokok dan semua beban yang ditimbulkannya.

Sejalan dengan yang disampaikan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Julius Ibrani. Pihaknya tidak melihat *lockbook* ketiga paslon yang memuat agenda kebijakan yang mendukung pengendalian tembakau, yang secara global telah menjadi salah satu perhatian utama sehingga masuk dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Menurutnya, *tobacco control* adalah problem ketiga paslon yang tidak berani secara eksplisit mau membahasnya dan mempertanyakan adanya kepentingan politik dan kepentingan industri. “Kami tunggu isu mengenai masalah rokok ini diangkat dalam debat capres terakhir nanti, karena isu rokok bukan hanya masalah kesehatan tapi juga jangka panjang soal anak muda yang sering digembar-gemborkan pasangan 02,” tegasnya.

Sebagai penutup, Nina Samidi mengharapkan diskusi hari ini tidak selesai sampai di ruang diskusi saja sehingga seluruh aspirasi akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada ketiga paslon untuk menjadi masukan dan referensi agenda kebijakan kesehatan yang akan mereka jalankan saat terpilih.

Simak diskusi di: https://www.youtube.com/live/WXZ3QwWMGTo?si=OZLH8fkpvi_lhOll

Narahubung: sekretariat@komnaspt.or.id atau (021) 3917354.

Tentang Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT):

Merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah konsumsi produk tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 23 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi kesehatan, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli akan bahaya produk tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda dan keluarga miskin. Info: komnaspt.or.id